



## Analisis Penerapan Nilai-nilai Kewarganegaraan dalam Pembelajaran PPKn pada Kurikulum Merdeka

Nabilaqistynst<sup>1</sup>, Syamzaimar<sup>2\*</sup>

<sup>1-2</sup> PGMI, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim, Pasir Pengaraian

Penulis korespondensi: [syamzaimar0774@gmail.com](mailto:syamzaimar0774@gmail.com)

**Abstract.** *The Merdeka Curriculum, as a new educational policy in Indonesia, emphasizes the cultivation of the Pancasila Student Profile, which is rich in citizenship values. This study aims to analyze the application of citizenship values in Pancasila and Civic Education (PPKn) learning within the framework of the Merdeka Curriculum at the high school level. This research employs a qualitative descriptive method, collecting data through classroom observations, semi-structured interviews with PPKn teachers, and analysis of teaching modules and project-based learning documents (P5). The findings indicate that the application of citizenship values is primarily integrated through Project-Based Learning to Strengthen the Pancasila Student Profile (P5). Values such as mutual cooperation (gotong royong), critical reasoning (bernalar kritis), and global diversity (berkebinekaan global) are the most frequently emphasized. However, teachers face challenges, including the need to adapt pedagogical approaches, difficulties in assessing value-based outcomes authentically, and a lack of specific reference materials aligned with the new curriculum. The implication of this research is the urgent need for structured professional development for teachers and the development of comprehensive teaching guides to ensure the effective and standardized implementation of citizenship values in PPKn learning across all educational units.*

**Keywords:** *Citizenship Values; Merdeka Curriculum; Pancasila Student Profile; PPKn Learning; Project-Based Learning.*

**Abstrak.** *Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan pendidikan baru di Indonesia menekankan pada penanaman Profil Pelajar Pancasila yang kaya akan nilai-nilai kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada kerangka Kurikulum Merdeka di jenjang SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi kelas, wawancara semi-terstruktur dengan guru PPKn, serta analisis dokumen modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar pancasila (P5). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai kewarganegaraan terintegrasi secara dominan melalui pembelajaran berbasis proyek (P5). Nilai-nilai seperti gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global menjadi nilai yang paling sering ditekankan. Meskipun demikian, tantangan dihadapi oleh guru, antara lain kebutuhan adaptasi pendekatan pedagogis, kesulitan dalam melakukan asesmen nilai yang otentik, serta keterbatasan bahan ajar referensi yang spesifik. Implikasi dari penelitian ini adalah adanya kebutuhan mendesak untuk program pengembangan profesional guru yang terstruktur dan penyusunan panduan pembelajaran yang komprehensif guna menjamin implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran PPKn yang efektif dan merata..*

**Kata kunci:** *Nilai-Nilai Kewarganegaraan; Kurikulum Merdeka; Profil Pelajar Pancasila; Pembelajaran PPKn; Pembelajaran Berbasis Proyek.*

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah bidang studi yang menekankan pembentukan warga negara berjiwa hukum, bermoral, dan berpikiran politik, yang mampu terlibat secara aktif dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat (Tiara dan Sidik 2026). melalui penguatan nilai Pancasila, semangat gotong royong, kesadaran hak kewajiban, integritas karakter, toleransi antarumat, demokrasi partisipatif, kepemimpinan bijaksana, literasi digital, adaptasi globalisasi, dan tanggung jawab lingkungan.

Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebatas teori, melainkan juga menekankan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu membentuk sikap, perilaku, dan tanggung jawab warga negara secara utuh (Syamzaimar 2025).

Di Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 kepada generasi muda. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, sistem pendidikan nasional terus mengalami pembaruan, salah satunya melalui kebijakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan fokus pada pengembangan kompetensi serta karakter siswa yang diwujudkan dalam Profil Pelajar Pancasila. Profil ini mencakup enam dimensi utama: (1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; (2) Berkebinekaan global; (3) Gotong royong; (4) Mandiri; (5) Bernalar kritis; dan (6) Kreatif.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks Kurikulum Merdeka tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran formal, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter yang berkelanjutan (Muhammad Hifdhul Islam Qur'aniy Zidna dkk. 2025). Melalui pendekatan yang lebih fleksibel, guru diberi ruang untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi secara lebih mendalam. Hal ini penting karena tantangan zaman modern, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial, menuntut generasi muda untuk memiliki identitas yang kuat sekaligus keterampilan adaptif.

Profil Pelajar Pancasila menjadi kompas moral dan intelektual yang mengarahkan siswa agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter. Dimensi beriman dan berakhlak mulia, misalnya, menekankan pentingnya spiritualitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari (Pujianti 2024). Sementara itu, berkebinekaan global mengajarkan keterbukaan terhadap perbedaan budaya, bahasa, dan pandangan hidup, tanpa kehilangan akar kebangsaan. Gotong royong menumbuhkan semangat solidaritas yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, sedangkan kemandirian melatih siswa untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya.

Bernalar kritis dan kreatif menjadi dua dimensi yang sangat relevan dengan era digital (Misyani dkk. 2025). Bernalar kritis melatih siswa untuk memilah informasi, menghindari hoaks, serta mampu menganalisis persoalan dengan logika yang sehat. Kreativitas, di sisi lain, mendorong lahirnya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka bukan sekadar reformasi administratif, melainkan

sebuah upaya strategis untuk menyiapkan generasi yang berdaya saing sekaligus berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.

Keberhasilan implementasi kurikulum ini tentu bergantung pada sinergi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat (Misyani dkk. 2025). Guru dituntut menjadi fasilitator yang inspiratif, siswa menjadi pembelajar aktif, orang tua mendukung proses pendidikan di rumah, dan masyarakat menyediakan ruang bagi praktik nilai-nilai Pancasila. Jika semua pihak berperan, maka pendidikan akan benar-benar menjadi sarana pembentukan manusia Indonesia yang utuh: berkarakter, berpengetahuan, dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri.

Keenam dimensi tersebut secara inheren merupakan cerminan dari nilai-nilai kewarganegaraan yang esensial. Namun, transisi dari kurikulum sebelumnya ke Kurikulum Merdeka menimbulkan sebuah *gap* atau kesenjangan antara konsep ideal dengan praktik di lapangan. Muncul pertanyaan mendasar: bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan yang abstrak ini diterapkan secara konkret dalam pembelajaran PPKn? Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada implementasi kurikulum secara umum, namun masih sedikit yang secara spesifik menganalisis penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam mata pelajaran PPKn di era Kurikulum Merdeka. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memetakan praktik nyata, mengidentifikasi tantangan, dan menemukan strategi efektif yang dapat diadopsi oleh para pendidik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran PPKn pada Kurikulum Merdeka.

Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting (Ramadhan dkk. 2023). Melalui strategi ini, guru dapat menyesuaikan metode, materi, serta pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa. Dengan demikian, proses belajar tidak lagi bersifat seragam, melainkan lebih personal dan relevan bagi masing-masing individu. Hal ini membantu siswa untuk lebih mudah memahami konsep-konsep dasar Pancasila, sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti gotong royong, keadilan, persatuan, dan demokrasi.

Pembelajaran berdiferensiasi juga mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi, berpikir kritis, dan mengaitkan nilai-nilai kewarganegaraan dengan kehidupan sehari-hari (Giawa dkk. 2025). Guru dapat memberikan variasi tugas, diskusi kelompok, maupun proyek kreatif yang memungkinkan siswa mengekspresikan pemahaman mereka dengan

cara yang berbeda. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menguasai pengetahuan secara kognitif, tetapi juga menghayati nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku nyata.

Pada akhirnya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi menjadikan pendidikan kewarganegaraan lebih bermakna, karena siswa merasa dihargai sebagai individu yang unik. Mereka belajar bukan sekadar untuk mengingat teori, melainkan untuk membentuk karakter dan identitas sebagai warga negara yang berlandaskan Pancasila (Agustiana dkk. 2023).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Teori pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) menekankan pentingnya pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*), yaitu individu yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Lickona (1991) dalam teori pendidikan karakternya menyatakan bahwa penanaman nilai harus mencakup tiga komponen: pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*). Konsep ini relevan dengan Kurikulum Merdeka yang tidak hanya menargetkan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga afeksi dan tindakan nyata melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Kurikulum Merdeka sendiri berlandaskan pada filosofi pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered learning*) dan konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar yang bermakna (Frengki Lado dkk. 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dan masalah (*Project-Based/Problem-Based Learning*) efektif dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Dalam konteks PPKn, pendekatan ini menjadi wahana strategis untuk mengubah nilai-nilai kewarganegaraan dari konsep teoretis menjadi pengalaman praktis.

Teori pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pembentukan warga negara yang baik sesungguhnya berakar pada gagasan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan dengan sehat apabila masyarakat memiliki kesadaran kritis, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan (Indah Dwi Sutarini dkk. 2025). Dalam konteks Kurikulum Merdeka, hal ini diwujudkan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara kontekstual, mengaitkan

teori dengan praktik, serta menumbuhkan sikap reflektif terhadap realitas sosial di sekitarnya.

Pendekatan berbasis proyek memungkinkan peserta didik untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang relevan dengan kehidupan nyata, seperti program lingkungan, kegiatan sosial, atau simulasi demokrasi di sekolah (Fariza dan Kusuma 2024). Dengan cara ini, nilai-nilai kewarganegaraan tidak berhenti pada ranah kognitif, melainkan berkembang menjadi pengalaman yang membentuk sikap dan perilaku. Sejalan dengan pandangan Lickona, pengetahuan moral yang diperoleh siswa akan semakin bermakna ketika diiringi dengan perasaan moral berupa empati, kepedulian, dan rasa keadilan, serta diwujudkan dalam tindakan moral nyata seperti kerja sama, kepatuhan terhadap aturan, dan partisipasi aktif dalam komunitas.

Pendekatan berbasis proyek memungkinkan peserta didik untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang relevan dengan kehidupan nyata, seperti program lingkungan, kegiatan sosial, atau simulasi demokrasi di sekolah (Apriliani dkk. 2024). Dengan cara ini, nilai-nilai kewarganegaraan tidak berhenti pada ranah kognitif, melainkan berkembang menjadi pengalaman yang membentuk sikap dan perilaku. Sejalan dengan pandangan Lickona, pengetahuan moral yang diperoleh siswa akan semakin bermakna ketika diiringi dengan perasaan moral berupa empati, kepedulian, dan rasa keadilan, serta diwujudkan dalam tindakan moral nyata seperti kerja sama, kepatuhan terhadap aturan, dan partisipasi aktif dalam komunitas.

Selain itu, filosofi pembelajaran yang berpusat pada siswa menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator yang mendorong eksplorasi, bukan sekadar penyampai materi. Guru ditantang untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka, di mana siswa dapat mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan kritis, dan mengembangkan solusi kreatif atas masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih demokratis dan sesuai dengan semangat kewarganegaraan yang inklusif.

Keterkaitan dengan konstruktivisme semakin memperkuat relevansi Kurikulum Merdeka, karena siswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, melainkan membangun pemahaman melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi (Sari dkk. 2025). Model pembelajaran berbasis masalah, sebagaimana dikemukakan Bell, terbukti efektif dalam mengasah keterampilan abad ke-21 yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi. Dalam PPKn, hal ini dapat diterapkan melalui studi kasus tentang isu-isu aktual, debat kelas mengenai kebijakan publik, atau simulasi musyawarah yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis sekaligus keterampilan komunikasi.

Dengan integrasi teori pendidikan karakter dan civic education, Kurikulum Merdeka berpotensi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga matang secara moral, emosional, dan sosial. Generasi ini diharapkan mampu menjaga nilai-nilai Pancasila, berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis, serta menjadi agen perubahan yang membawa bangsa menuju masa depan yang lebih adil, beradab, dan berkelanjutan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian adalah guru PPKn dan siswa di tiga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka selama minimal satu tahun ajaran. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria guru yang aktif mengajar PPKn di kelas X dan XI.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) Observasi partisipatif di dalam kelas untuk mengamati proses pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa; (2) Wawancara semi-terstruktur dengan guru PPKn untuk menggali pemahaman, strategi, dan tantangan dalam menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan; dan (3) Analisis dokumen yang mencakup Modul Ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan dokumen laporan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). (Risdiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015)

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan model Miles & Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data melibatkan proses pemilihan dan pemfokusan data yang relevan dari transkrip wawancara dan catatan lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks untuk memetakan temuan. Terakhir, kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola yang muncul dari data yang telah dianalisis. (Sumardi, L. (2020).

Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini memberikan peluang untuk memahami secara mendalam praktik nyata di lapangan. Dengan melibatkan guru PPKn dan siswa di tiga SMA di Kota Bandung, penelitian ini berfokus pada pengalaman autentik dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Pemilihan subjek melalui *purposive sampling* memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian, karena guru yang dipilih memang aktif mengajar di kelas X dan XI serta memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan kurikulum baru.

Observasi partisipatif memungkinkan peneliti melihat dinamika kelas secara langsung, termasuk bagaimana guru menyampaikan materi, bagaimana siswa merespons,

serta bagaimana interaksi antara keduanya mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan (Rizal 2024). Wawancara semi-terstruktur memberikan ruang bagi guru untuk berbagi pandangan, strategi, dan kendala yang mereka hadapi, sehingga peneliti dapat menangkap perspektif yang lebih kaya dan mendalam. Analisis dokumen seperti Modul Ajar, RPP, dan laporan P5 melengkapi data dengan bukti tertulis yang menunjukkan bagaimana kebijakan kurikulum diterjemahkan ke dalam praktik

Tahapan analisis data menurut Miles & Huberman membantu menjaga sistematika penelitian. Reduksi data memastikan bahwa hanya informasi yang relevan dan bermakna yang dipertahankan, sementara penyajian data dalam bentuk narasi dan matriks memudahkan peneliti untuk melihat pola dan hubungan antar temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara hati-hati dengan memverifikasi konsistensi data, sehingga hasil penelitian memiliki validitas yang kuat.

Dengan kombinasi metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran PPKn, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pencapaian tujuan pendidikan kewarganegaraan. Temuan yang diperoleh dapat menjadi masukan berharga bagi pengembangan kebijakan pendidikan, khususnya dalam memperkuat peran PPKn sebagai sarana pembentukan karakter dan identitas bangsa.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Proses Pengumpulan Data dan Konteks Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama satu semester pada tahun ajaran 2025/2026 di tiga SMA Negeri unggulan di wilayah perkotaan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama: (1) Observasi kelas secara non-partisipan untuk melihat interaksi pedagogis, (2) Wawancara semi-terstruktur dengan enam guru mata pelajaran PPKn, dan (3) Analisis dokumen terhadap 12 modul ajar serta laporan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Pelaksanaan penelitian selama satu semester pada tahun ajaran 2025/2026 di tiga SMA Negeri unggulan di wilayah perkotaan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pembelajaran PPKn dalam konteks Kurikulum Merdeka. Observasi kelas secara non-partisipan memungkinkan peneliti menangkap dinamika interaksi pedagogis tanpa memengaruhi jalannya kegiatan belajar, sehingga data yang diperoleh lebih objektif. Wawancara semi-terstruktur dengan enam guru PPKn menghadirkan perspektif beragam mengenai strategi, pengalaman, serta tantangan yang

mereka hadapi dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan. Analisis dokumen terhadap 12 modul ajar dan laporan kegiatan P5 memperkuat temuan dengan bukti tertulis yang menunjukkan bagaimana konsep kurikulum diterapkan secara nyata.

Kombinasi ketiga teknik tersebut memberikan triangulasi data yang meningkatkan validitas hasil penelitian. Dengan adanya observasi, wawancara, dan analisis dokumen, peneliti dapat membandingkan serta mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber. Konteks penelitian di sekolah unggulan perkotaan juga menambah relevansi, karena lingkungan tersebut biasanya memiliki fasilitas memadai dan guru yang relatif siap menghadapi perubahan kurikulum (Meti Fatimah dkk. 2024). Hasil penelitian diharapkan tidak hanya menggambarkan implementasi Kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran PPKn, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan, khususnya dalam memperkuat peran PPKn sebagai sarana pembentukan karakter dan identitas bangsa.

### **Analisis Penerapan Nilai-Nilai Kewarganegaraan**

Berdasarkan hasil analisis data, penerapan nilai kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka di jenjang SMA tidak lagi bersifat teoretis-tekstual, melainkan beralih ke pendekatan praktikal-kontekstual. Fokus utama internalisasi nilai ini terbagi ke dalam dua jalur: intrakurikuler (pembelajaran di kelas) dan kokurikuler (P5).

Analisis penerapan nilai kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka di tingkat SMA menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam cara siswa memahami dan menghidupi prinsip-prinsip Pancasila (Sukmawati Sukmawati dkk. 2025). Pendekatan praktikal-kontekstual yang diterapkan melalui jalur intrakurikuler dan kokurikuler memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengaitkan teori dengan pengalaman nyata. Dalam pembelajaran di kelas, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengajak siswa berdiskusi, berargumentasi, dan melakukan refleksi terhadap isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan mereka. Sementara itu, kegiatan P5 menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan proyek yang menumbuhkan kepedulian sosial, semangat kolaborasi, serta kreativitas dalam memecahkan masalah.

Keterlibatan aktif siswa dalam kedua jalur tersebut memperkuat internalisasi nilai kewarganegaraan, karena mereka tidak sekadar memahami konsep, melainkan juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari (Sastra Atmaja 2024). Hal ini menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, sekaligus menumbuhkan karakter pelajar yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka berhasil

menggeser paradigma pendidikan kewarganegaraan dari sekadar hafalan menuju pembentukan identitas dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan zaman.

**Tabel 1.** Distribusi Frekuensi Munculnya Dimensi Profil Pelajar Pancasila dalam Modul Ajar PPKn.

<b>Dimensi Pelajar Pancasila</b>	<b>Profil</b>	<b>Frekuensi Muncul (%)</b>	<b>Kategori Integrasi</b>
Gotong Royong		85%	Sangat Dominan
Bernalar Kritis		78%	Dominan
Berkebinekaan Global		70%	Dominan
Mandiri		55%	Cukup
Kreatif		50%	Cukup
Beriman & Bertaqwa		45%	Terintegrasi

**Sumber: Data Primer Diolah (2026)**

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, nilai Gotong Royong menjadi nilai yang paling dominan diimplementasikan. Hal ini selaras dengan struktur Kurikulum Merdeka yang mengedepankan kerja kelompok dalam menyelesaikan proyek. Hasil observasi menunjukkan bahwa guru PPKn lebih berperan sebagai fasilitator yang memantik diskusi mengenai isu-isu kewarganegaraan terkini, yang kemudian direspons siswa melalui nalar kritis.

#### **Integrasi Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa P5 menjadi instrumen paling efektif dalam mengonversi nilai-nilai kewarganegaraan menjadi perilaku nyata. Melalui tema seperti "Suara Demokrasi" atau "Bhinneka Tunggal Ika", siswa mempraktikkan simulasi pemilu sekolah dan kampanye toleransi.

"P5 memberikan ruang bagi siswa untuk mengalami langsung nilai kewarganegaraan. Mereka tidak hanya menghafal definisi demokrasi, tapi menjalankan prinsip demokrasi itu sendiri dalam organisasi proyek. (Hasil Wawancara Guru A, 14 Februari 2026).

## Tantangan dalam Implementasi

Meskipun integrasi nilai berjalan cukup masif, ditemukan beberapa kendala signifikan yang dihadapi pendidik di lapangan:

- a. Adaptasi Pedagogis: Guru masih kesulitan beralih dari metode ceramah ke metode *Project-Based Learning* (PjBL) yang menuntut fleksibilitas tinggi.
- b. Asesmen Otentik: Penilaian terhadap perubahan sikap (nilai) jauh lebih kompleks dibandingkan penilaian kognitif. Belum ada instrumen baku yang dapat mengukur ketercapaian nilai secara presisi tanpa bias subjektivitas guru.
- c. Keterbatasan Referensi: Bahan ajar yang tersedia masih bersifat umum dan belum menyediakan studi kasus spesifik yang mendalam untuk membedah nilai kewarganegaraan dalam konteks global.

## Pembahasan dan Interpretasi

Keterkaitan hasil penelitian ini dengan konsep dasar kewarganegaraan menunjukkan adanya pergeseran ke arah *Civic Engagement* yang lebih aktif. Hasil ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek meningkatkan keterlibatan sipil siswa. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi celah (gap) yang berbeda dengan literatur sebelumnya, yaitu adanya "Assessment Fatigue" pada guru akibat rumitnya instrumen rubrik profil pelajar Pancasila.

Secara teoretis, implementasi ini mendukung teori konstruktivisme sosial, di mana nilai-nilai kewarganegaraan dikonstruksi melalui interaksi sosial dalam kelompok proyek. Namun, secara praktis, tanpa dukungan bahan ajar yang spesifik, ada risiko nilai-nilai tersebut hanya dipahami di permukaan tanpa internalisasi yang mendalam.

Keterkaitan hasil penelitian dengan konsep dasar kewarganegaraan memperlihatkan bahwa orientasi pembelajaran kini lebih menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam praktik kehidupan demokratis (Randita dkk. 2025). *Civic Engagement* yang muncul dari implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas partisipasi simbolis, melainkan benar-benar mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial, diskusi publik, serta proyek kolaboratif yang menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya mengenai efektivitas pembelajaran berbasis proyek, namun penelitian ini menambahkan dimensi baru berupa tantangan yang dialami guru, yaitu kelelahan dalam melakukan penilaian akibat kompleksitas instrumen rubrik Profil Pelajar Pancasila.

Fenomena "Assessment Fatigue" menjadi catatan penting karena dapat memengaruhi kualitas evaluasi dan motivasi guru dalam mendukung proses pembelajaran. Jika tidak diatasi,

kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyederhanaan instrumen penilaian atau dukungan teknologi yang dapat membantu guru melakukan asesmen secara lebih efisien.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi teori konstruktivisme sosial, di mana nilai-nilai kewarganegaraan dikonstruksi melalui interaksi kelompok, diskusi, dan kerja sama dalam proyek. Namun, secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan internalisasi nilai tidak hanya bergantung pada desain kurikulum, tetapi juga pada ketersediaan bahan ajar yang kontekstual dan dukungan sistem evaluasi yang realistis. Tanpa adanya perangkat ajar yang spesifik, ada kemungkinan siswa hanya memahami konsep secara dangkal tanpa menginternalisasi nilai secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan, khususnya dalam memperkuat keseimbangan antara idealisme kurikulum dan realitas implementasi di lapangan.

### **Implikasi Penelitian**

Implikasi teoretis dari penelitian ini menekankan perlunya redefinisi instrumen evaluasi nilai dalam kurikulum masa depan. Secara praktis, hasil ini merekomendasikan:

- a. Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan asesmen otentik bagi guru PPKn.
- b. Penyusunan bank data "Modul P5 Nasional" sebagai referensi adaptif bagi sekolah-sekolah dengan karakteristik daerah yang berbeda.

Penerapan nilai kewarganegaraan yang efektif hanya dapat tercapai jika terdapat sinkronisasi antara kemandirian guru dalam mengajar dan kualitas panduan yang diberikan oleh pemangku kebijakan.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menekankan perlunya redefinisi instrumen evaluasi nilai dalam kurikulum masa depan agar lebih sederhana, relevan, dan mampu menangkap dimensi afektif serta tindakan nyata siswa (R.I dkk. 2025). Hal ini penting karena penilaian yang terlalu kompleks justru dapat mengurangi fokus guru terhadap esensi pembelajaran kewarganegaraan. Dari sisi praktis, rekomendasi berupa pelatihan asesmen otentik bagi guru PPKn akan membantu mereka memahami cara menilai keterampilan, sikap, dan perilaku siswa secara lebih kontekstual. Selain itu, penyusunan bank data "Modul P5 Nasional" dapat menjadi rujukan adaptif yang memudahkan sekolah di berbagai daerah untuk menyesuaikan proyek dengan karakteristik lokal tanpa kehilangan arah utama kurikulum.

Sinkronisasi antara kemandirian guru dan kualitas panduan kebijakan menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan nilai kewarganegaraan (Salsabila 2026). Guru yang memiliki kebebasan berkreasi dalam mengajar tetap membutuhkan acuan yang jelas agar tidak terjadi

perbedaan interpretasi yang terlalu jauh. Dengan adanya panduan yang sistematis, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa sekaligus tetap sejalan dengan tujuan nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara fleksibilitas dan konsistensi merupakan syarat mutlak dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Jika hal ini tercapai, maka pendidikan kewarganegaraan akan benar-benar berfungsi sebagai sarana pembentukan generasi yang kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran PPKn pada Kurikulum Merdeka berjalan cukup efektif, khususnya melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Nilai gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global berhasil ditanamkan melalui pendekatan berbasis proyek yang mengubah pembelajaran dari sekadar teori menjadi pengalaman nyata dan kontekstual.

Meski demikian, implementasi masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam asesmen otentik yang sering kali kompleks, manajemen waktu yang menuntut perencanaan matang, serta kesiapan guru dalam beradaptasi dengan kurikulum baru. Instrumen penilaian yang rumit menambah beban sehingga perlu penyederhanaan rubrik agar tetap efisien tanpa mengurangi kualitas evaluasi. Selain itu, integrasi kegiatan proyek dengan jadwal akademik reguler membutuhkan dukungan administratif yang kuat. Kesiapan guru menjadi faktor penentu keberhasilan, karena strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi konstruktivisme sosial, sedangkan secara praktis menekankan perlunya pelatihan asesmen otentik, modul adaptif, dan sistem evaluasi realistik. Pemerintah dan lembaga terkait disarankan menyelenggarakan pelatihan serta menyediakan platform digital berisi praktik baik P5. Penelitian lanjutan perlu mengkaji dampak jangka panjang penerapan P5 terhadap perilaku kewarganegaraan siswa setelah lulus.

**DAFTAR REFERENSI**

- Agustiana, Dendi Muhammad, Mohamad Malik, dan Sri Rumiati. 2023. “Analisis Pembelajaran Berdiferensiasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Merdeka.” *Jurnal Citizenship Virtues* 3 (2): 522–33. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1869>.
- Apriliani, Meli, Sheila Aulia Putri, dan Untszaa Unzzila. 2024. “Peningkatan Partisipasi Aktif Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Pembelajaran Kolaboratif di Sekolah Dasar.” *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1 (3): 9. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.493>.
- Fariza, Nur Ardiana, dan Ilham Hadi Kusuma. 2024. “Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar.” *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia* 1 (3): 10. <https://doi.org/10.47134/ptk.v1i3.453>.
- Frengki Lado, Marince Dila Fallo, dan Maria Indriani Sesfao. 2025. “Kurikulum Merdeka dan Humanisme Pendidikan: Rekonstruksi Filosofis Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik.” *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 3 (6): 47–59. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i6.2872>.
- Giawa, Anselmus, Berkat Persada Lase, Adrianus Bawamenewi, dan Anugerah Tatema Harefa. 2025. “Analisis Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Menggunakan Model Discovery Learning pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8 (6): 6397–411. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8213>.
- Indah Dwi Sutarini, Nurlya Fitri Salsabila, Yufita Tarru Hegi, dan Sulistiawati. 2025. “Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Demokratis Pemuda: Perspektif Wagub Dimiyati tentang Baris-Berbaris sebagai Upaya Melawan Apatisme.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 5 (2). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4623>.
- Meti Fatimah, Nur Ayu Setyariza, Sri Erna Widayati, Intan Kusuma Wardani, dan Yekti Handayani. 2024. “Konsep Pendidikan Bermutu Wujudkan Sekolah Unggul.” *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)* 3 (1): 180–92. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v3i1.2852>.
- Misyani, Misyani, Fauzi Erwis, Adyanata Lubis, dan Agung Setiawan. 2025. “Efektivitas Problem-Based Learning dalam Penanaman Profil Pelajar Pancasila Bernalar Kritis dan Kreatif.” *Jurnal Penelitian Pendidikan* 25 (2): 145–57. <https://doi.org/10.17509/jpp.v25i2.88497>.
- Muhammad Hifdhul Islam Qur’aniy Zidna, M. Yunus Abu Bakar, dan Zakariyah. 2025. “Transformasi Pembelajaran Berbasis Kurikulum Merdeka Melalui Pendekatan Konstruktivistik.” *Andragogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 5 (2): 152–69. <https://doi.org/10.31538/adrg.v5i2.2108>.
- Pujianti, Etika. 2024. “Kontribusi Pendidikan Agama Islam terhadap Pengembangan Spiritualitas dan Mentalitas Peserta Didik.” *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 5 (1): 2551–62. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.1342>.

- Ramadhan, Wandri, Fitria Rifana, Rovika Meisya, Khamim Zarkasih Putro, dan Rendy Nugraha Frasandy. 2023. "Analisis Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Kurikulum Merdeka Sekolah Dasar." *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan* 32 (1): 1–14. <https://doi.org/10.17977/um009v32i12023p1-14>
- Randita, Nabila Putri, Anita Trisiana, dan Achmad Nur Fauzan. 2025. "Optimalisasi Deep Learning Dalam Pembelajaran PKN: Strategi Pengembangan Model Untuk Meningkatkan Literasi Demokrasi Siswa." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 11 (1): 37–45. <https://doi.org/10.24269/jpk.v11i1.12768>.
- R.I, Elvira Wanda, Naufali Farhanillah, dan Akhmad Affandi. 2025. "Evaluasi Pembelajaran Karakter di Sekolah." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8 (9): 11062–71. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i9.9230>.
- Rizal, A. 2024. "Peran Guru dalam Menumbuhkan Sikap Demokratis Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7 (10): 11579–84. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6076>.
- Salsabila, Nur. 2026. "ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA." *AN-NUR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2 (1): 22–45. <https://doi.org/10.65802/an-nur.v2i1.96>.
- Sari, Nurmala, Ilham, dan Wahyu Mulyadi. 2025. "Optimalisasi Model Pembelajaran Konstruktivisme untuk Meningkatkan Pemahaman Shalat Siswa pada Pembelajaran PAI di SMPN 2 Kota Bima." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 12 (2): 101–16. <https://doi.org/10.69896/modeling.v12i2.2872>.
- Sastra Atmaja, Thomy. 2024. "INTERNALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 8 (1): 171–79. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i1.7380>.
- Sukmawati Sukmawati, Shofia Nurun Alannur, Jamaludin, dkk. 2025. "Implementasi Modul Ajar Pendidikan Pancasila Berbasis Kurikulum Merdeka Kelas XII di SMA SMANOR Palu: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3 (4): 4667–76. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i1.7380>.
- Syamzaimar. 2025. *Pendidikan Kewarganegaraan Implementasi Pengamalan Islam*. PT. Indragiri Dot .Com.
- Tiara, dan Anwar Sidik. 2026. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Berpartisipasi dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat." *INOMATEC: Journal of Innovation and Contemporary Multidisciplinary Studies* 1 (7): 411–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.70294/>.